

Masa Depan Demokrasi Mesir Pasca-Arab Spring

Ahmad Baihaqi, Yon Machmudi

Program Studi Kajian Wilayah Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia
e-mail : abayputra40@gmail.com

Abstract

This research discusses the progress of democracy in Egypt after the Arab Spring. When the Arab Spring expanded in the Middle East to Egypt, it was considered the beginning of a transition towards a country managed by the concept of democracy. The Arab Spring, which has been in turmoil since early 2011, has become the beginning of the rise of a mass movement to demand changes in the socio-political order. The Arab Spring in Egypt was initially expected to create a democracy that guaranteed equality and social justice. However, Egypt has failed to implement democracy and is left behind in almost all sectors of life, including economy. Instead of democracy, what is happening in Egypt is praetorianism, namely the military that dominates state decision-making, and frozen democracy, namely the freezing of a democratic political system that has developed due to various existing restrictions.

Keywords: Arab Spring, Egypt, frozen democracy, praetorianism

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kemajuan demokrasi di Mesir pasca Arab Spring. Ketika Arab Spring meluas di Timur Tengah sampai ke Mesir, hal itu dianggap menjadi awal transisi menuju negara yang dikelola dengan konsep demokrasi. Arab Spring yang berkejolak sejak awal 2011 lalu menjadi awal kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik di berbagai negara Timur Tengah. Arab Spring di Mesir semula diharapkan dapat mewujudkan demokrasi yang menjamin kesetaraan dan keadilan sosial. Namun, Mesir mengalami kegagalan dalam menerapkan demokrasi dan ketertinggalan hampir di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi. Alih-alih demokrasi, yang terjadi di Mesir adalah praetorianisme, yaitu militer yang mendominasi pengambilan keputusan negara dan *frozen democracy*, yaitu bekunya sistem politik demokrasi yang berkembang akibat berbagai batasan yang ada.

Kata kunci: Arab Spring, demokrasi beku, Mesir, praetorianism

Pendahuluan

Pada akhir tahun 2010 hingga pertengahan 2011, pemerintah beberapa negara Timur Tengah menghadapi serangkaian demonstrasi yang diorganisir oleh aktivis-aktivis pemuda. Gerakan demonstrasi ini, yang kemudian dikenal dengan “Arab Spring” bermula dari Provinsi Sidi Bouzid di Tunisia, lalu mulai menyebar ke negara Arab lainnya, seperti Yordania, Yaman, Mesir, Libya, Bahrain, dan Suriah, beberapa pemberontakan juga terjadi di Irak, Lebanon, Maroko, dan Arab Saudi. Jutaan warga di berbagai negara melakukan aksi protes untuk menuntut penurunan rezim yang sedang memerintah. Arab Spring menjadi awal revolusi di Timur Tengah. Gelombang pertama terjadi di Tunisia yang akhirnya berhasil melakukan perubahan terhadap pemerintahannya yang otoriter. Keberhasilan Arab Spring di Tunisia mendorong warga di negara-negara lain merasa perlu untuk melakukan demonstrasi. Emosi masyarakat Timur Tengah semakin memanas dengan adanya ketidakadilan di negaranya masing-masing.

Arab Spring pun dipandang sebagai awal pembangunan sistem serta tatanan kehidupan yang lebih transparan. Lewat sistem itu, kekuasaan pemimpin bisa dibatasi dengan memberikan ruang kebebasan (hak) kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik, baik partisipasi untuk memilih dan dipilih, maupun dalam bentuk mengontrol pemerintahan (Sahide, 2015: 2). Pergolakan tersebut sering disebut dengan kebangkitan Arab, pemberontakan Arab, atau Arab Spring meskipun tidak semua negara yang bergejolak ialah bangsa Arab. Sebutan lainnya dikenal dengan Jasmine Revolution (Revolusi Melati), revolusi yang menjadi harapan baru yang diyakini sebagai langkah awal terbentuknya era pemerintahan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Jasmine Revolution merupakan istilah untuk mengidentikkan sebuah pergolakan rakyat di negara-negara Timur Tengah yang digambarkan bagai bunga melati yang sedang mekar. Revolusi tersebut menjangar begitu cepat di kawasan Timur Tengah dan mengguncang stabilitas politik di kawasan. Revolusi tersebut merupakan sebuah gerakan massa yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka yang dimulai dari negara Tunisia, menyusul Mesir kemudian meluas hingga ke negara-negara lain seperti Aljazair, Yaman, Bahrain, Libya dan negara-negara lainnya (Tamburaka 2011: 9).

Seperti efek domino, demonstrasi menuntut adanya revolusi mulai terjadi di satu demi satu negara Timur Tengah. Keberhasilan di sejumlah negara mendorong warga di negara-negara lainnya untuk menggerakkan revolusi dan melakukan demonstrasi. Efek domino ini tidaklah buruk, karena masyarakat ingin menuntut adanya perubahan dari otokrasi menjadi demokrasi dan ideologi diubah menjadi pragmatis. Arab Spring

menjadi langkah besar suatu perubahan dunia, yang menjadi bukti bahwa kekuatan aktor non-negara sudah mulai berdampak terhadap aktor negara. Maka dari itu, Hashemi berpandangan bahwa Arab Spring memungkinkan untuk diistilahkan “Fourth wave of Democratization,” sebagai gelombang keempat demokratisasi (Hashemi, 2013: 207). Barakat memperkuat pandangan ini dengan mengatakan bahwa demokrasi sebenarnya telah menjadi tuntutan masyarakat Dunia Arab sejak tahun 1990-an. Hal ini juga diperkuat oleh hasil survei yang dirilis oleh Arab Human Development Report (AHDR) pada tahun 2003 yang menunjukkan bahwa 60% masyarakat dunia Arab mendukung demokrasi dan 80% menolak pemerintahan otoriter (Sau, 2004: 4233).

Arab Spring merupakan keadaan dimana pemerintahan pada akhirnya hampir dipastikan sulit mendapatkan kedaulatan dari rakyatnya, karena rakyat merasa tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Pemerintah menjadi diktator ketika menegakkan kebijakan. Pengangguran serta timbulnya tindakan korupsi, merupakan keadaan yang menyengsarakan. Hal ini membuat rakyat berusaha untuk menurunkan pemerintah yang berkuasa dan menuntut adanya pemerintahan baru (Agastya, 2013: 30). Hal itulah yang menjadi faktor penyebab meletusnya Arab Spring di kawasan Afrika Utara.

Menurut Iqbal & Soyomukti (2011: 16), terdapat penindasan yang terlihat di antaranya pengangguran, inflasi, kenaikan harga khususnya sembako, kebebasan dalam politik baik dalam hak berbicara ataupun mengemukakan pendapat, bahkan terlihat oleh rakyat korupsi yang terjadi di kalangan pemerintah. Dalam bukunya, Sahide (2015: 54) menulis bahwa terjadi ketimpangan tingkat kesejahteraan yang terjadi antara rezim Husni Mubarak dan rezim dengan rakyat yang masih di bawah garis kemiskinan. Hal tersebutlah yang menyulut semangat rakyat dan golongan pemuda untuk menyuarakan aspirasi lewat aksi demonstrasi yang dilakukan terhadap elite pemerintahan.

Dalam aksi demonstrasi ini, terjadi bentrokan antara demonstran dengan aparat keamanan Mesir. Mesir dicatat banyak melakukan pelanggaran HAM, antara lain dengan menangkap orang-orang dengan pasukan khusus yang menggunakan pakaian preman. Organisasi HAM Mesir bahkan mencatat banyak kasus penyiksaan, sebagian berujung kematian, yang dilakukan oleh aparat kepolisian tahun 1993-2007. Terlihat bahwa ada kesamaan dalam cara mengatasi rakyat yang bertolak belakang dengan golongan elite, cara-caranya dalam menangkap dan menjadikannya tahanan politik yang berakibat pada pelanggaran HAM bagi negara tersebut (Sahide, 2015: 55).

Ketika Mesir dipimpin oleh Husni Mubarak, terjadilah masalah-masalah, seperti banyaknya pemuda yang menganggur, yang pada akhirnya menjadi beban untuk masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa negara tersebut mengalami ketimpangan sosial (Pristiana, 2018: 56). Bahkan pada saat itu mereka masih dianggap pemuda yang

masih belum bisa membawa perubahan terhadap rakyat dan negara. Menurut Peterson Institute for Internasional Economics (dalam Kamrava, 2014: 24), masalah mendasar Mesir adalah pengangguran kaum muda. Jumlah angkatan kerja yang terserap hanya sekitar 4% per tahun. Dengan angka itu, pengangguran di Mesir 10 kali lipat lebih tinggi untuk lulusan perguruan tinggi. Tercatat pula bahwa pada akhir 2010, sekitar 40% dari penduduk Mesir yang berjumlah di bawah 80 juta jiwa hidup dengan pendapatan per kapita sekitar 2 dollar AS per hari.

Kekuatan yang dimiliki oleh rezim Husni Mubarak adalah hubungannya dengan negara besar, seperti Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi. Karena menjadi aliansi yang cukup kuat dan dekat dengan AS, Mesir masih terus mendapat bantuan dari AS. Kekuatan ini yang mendukung keberadaan pemerintahan otoriter. Namun, kemampuan intelektual masyarakat yang bertambah serta perkembangan zaman milenial yang semakin maju menjadikan masyarakat sadar pentingnya demokrasi. Atas dasar ini, masyarakat melakukan demonstrasi meminta keadilan. Protes ini merupakan aksi massa terbesar untuk pertama kalinya di Mesir semenjak tahun 1970-an.

Setelah berdemo selama 18 hari, masa 30 tahun kepemimpinan otoriter Mubarak di Mesir pun berakhir. Gerakan massa yang terus terjadi sejak 25 Januari 2011 membuat Mubarak akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan kepada pihak militer (Said Ali, 2012: 12). Dengan demikian, Mesir menjadi negara kedua yang berganti kepemimpinan akibat tekanan gerakan massa dalam Arab Spring.

Perubahan pasca berhentinya Mubarak sebagai pemimpin Mesir diharapkan menjadi awal yang baru bagi kehidupan warga Mesir di era demokrasi. Namun kini, setelah dua belas tahun berlalu, apakah kemajuan di bidang demokrasi dan ekonomi seperti dibayangkan pada era Arab Spring telah terwujud di Mesir? Artikel ini akan mendeskripsikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian kualitatif deskriptif analisis yang berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti oleh penulis berdasarkan fakta dan data yang sudah terkumpul. Dalam pengumpulan data dan sumber demi menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penelitian pustaka.

Demokratisasi

Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata Yunani “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan dan kedaulatan. Gabungan dua kata “demos”, “cretain/cratos” (demokrasi) memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di

tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat (Ubaedillah, 2015: 131). Menurut pakar hukum tatanegara Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya (Mahmuzar, 2013: 47).

Sedangkan pengertian demokrasi menurut istilah atau terminologi adalah sebagai berikut (Ubaedillah dan Rozak, 2006: 130-131):

- a. Joseph A. Schemer mengatakan demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.
- b. Sedney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh rakyat biasa.
- c. Philipe C. Schmitter dan Terry Lyn Karl menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang terpilih.

Dari beberapa pandangan dan pengertian tersebut maka demokrasi bisa diartikan dengan suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.

Menurut Lincoln, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana kekuasaan kekuasaan politik tertinggi (supreme political authority) dan kedaulatan sovereignty ada ditangan rakyat, rakyat yang memiliki kedaulatan berhak untuk memerintah. Karena itu pemerintahan yang demokratis adalah pemerintah yang mendapat persetujuan rakyat atau pemerintahan yang sudah memiliki mandat untuk memerintah dari rakyat dalam sistem pemerintahan rakyat atau yang oleh Lincoln sebut dengan *government by people* tersebut direpresentasikan dalam bentuk lembaga perwakilan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat (Sahdan, 2004: 12).

Penerapan demokrasi sebagai sebuah ideologi suatu negara memerlukan proses yang bertahap agar dapat diimplementasikan secara maksimal. Secara harfiah, proses yang dimaksud dinamakan "demokratisasi". Proses terbentuknya demokrasi didasari

oleh kondisi-kondisi awal yang memantik penerapan demokrasi dalam tubuh sistem pemerintahan. Melalui pendekatan yang relevan dengan topik ini, Rustow melalui karyanya yang berjudul "Transition to Democracy: Toward a Dynamic Model" berargumen bahwa kondisi yang dapat memantik penerapan demokrasi ialah transisi. Transisi yang dimaksud ialah kondisi dimana adanya ketidakpuasan masyarakat atas kinerja rezim non-demokratis dalam mengelola pemerintahan serta didapati banyak kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dari sistem pemerintahan sebelumnya. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya koalisi suara dari masyarakat yang menginginkan perubahan ideologi. Keinginan dari masyarakat ini juga diperkuat dengan aksi untuk menggulingkan rezim sehingga nilai demokrasi dapat ditegakkan sebagai dasar dari sistem pemerintahan (Rustow, 1970: 34).

Praetorianisme

Praetorianisme diartikan sebagai berfungsinya sistem politik nasional dimana peran militer mendominasi pengambilan keputusan. Proses politik mendukung perkembangan militer sebagai kelompok inti penguasa politik, sehingga memainkan peran yang sangat penting dalam struktur dan institusi politik. Mengingat tren modernisasi secara umum, praetorianisme sering muncul di negara-negara pada tahap awal atau tengah modernisasi dan mobilisasi politik. Namun kenyataannya, elit politik ini tidak mampu membangun institusi dan struktur politik yang mendukung laju mobilisasi dan modernisasi sosial. Keterampilan kepemimpinan militer dalam politik (berbeda dari keterampilan birokrasi, administratif, dan manajerial) direkrut dari militer atau dari kelompok yang bersimpati kepada militer atau setidaknya tidak memusuhi militer (Utami & Anam, 2022: 134).

Penggunaan Praetorianisme dianggap tepat untuk menjelaskan fenomena Arab Spring di Mesir. Praetorianisme bersama dengan tipe penguasa dapat menjelaskan bagaimana posisi militer pada masa transisi menuju demokrasi di Mesir tetap berpengaruh kuat. Hal ini terlihat pada pemerintahan transisi pasca lengsernya Husni Mubarak yang dipimpin oleh kelompok militer yang menjalankan administrasi negara dan mengatur pemilihan umum hingga pemerintah sipil terpilih.

Frozen Democracy

Selain itu, penulis mengacu kepada konsep Robert Dahl tentang indikator-indikator demokrasi, dan teori demokrasi beku (*frozen democracy*). Menurut Sorensen, teori *frozen democracy* berusaha menggambarkan keadaan masyarakat dimana sistem

politik demokrasi yang berkembang saat ini menjadi layu karena berbagai batasan yang ada (Markoff, 2002: xviii). Sorensen mengembangkan empat indikator demokrasi beku, yaitu: 1) Stagnasi ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. 2) Proses pembentukan masyarakat sipil terhenti. 3) Konsolidasi sosial-politik yang tidak pernah mencapai stabilitas tetapi cenderung tampak jelas, 4) Masalah sosial politik dan hukum warisan pemerintahan sebelumnya yang belum terselesaikan (misalnya pelanggaran HAM, KKN, kebrutalan aparat birokrasi dan militer, penegakan hukum, dan sebagainya) (Markoff, 2002: xix).

Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan cerminan demokrasi, antara lain:

1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi
2. Kebebasan berekspresi
3. Hak memilih dan dipilih
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan
6. Alternatif sumber-sumber informasi
7. Pemilu yang bebas dan adil (Dahl, 1971: 3).

Demokratisasi Mesir

Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik, dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis, Mesir merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Afrika Utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, Mesir merupakan bagian dari Asia Barat (Hitti, 2001: 236). Kebudayaan Mesir didominasi oleh kebudayaan Islam yang kental, bahkan dijadikan sebagai penghasil peradaban Islam bagi bangsa Arab.

Mesir sebagai salah satu negara di Afrika Utara, juga mengalami gejolak Arab Spring pada tahun 2011. Revolusi yang dilakukan oleh rakyat ini terjadi menuntut adanya suksesi kepemimpinan dan perubahan sistem pemerintahan yang demokratis. Hingga akhirnya, revolusi itu pun berhasil dengan turunnya Husni Mubarak dari posisi kepresidenan dan dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 2012, dimana pada pemilu tersebut, Muhammad Mursi terpilih sebagai Presiden selanjutnya. Mursi yang terpilih oleh suara rakyat melalui proses pemilihan umum, sebagai satu-satunya mekanisme transfer kekuasaan yang paling legitimatif, sekaligus paling demokratis, nyatanya tak bisa membendung People Power untuk menuntut pelengserannya. Tentu saja hal itu menjadi penghianatan terhadap demokrasi yang selama ini digaungkan.

Demonstrasi sejak dulu sudah sering terjadi, namun tidak pernah berhasil dalam mengubah tatanan yang ada, apalagi menumbangkan rezim yang berkuasa. Namun, lain halnya dengan People Power yang dapat melakukan keduanya. "Suara rakyat yang tergabung dalam People Power memiliki andil besar untuk mengubah dan menghentikan kekuatan politik apapun yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama" (Lubis, 2011: 43). Hal ini merupakan salah satu wujud pengaruh dari People Power. Revolusi Arab Spring yang berhasil menggulingkan Husni Mubarak pada 25 Januari 2011 merupakan awal dari demokratisasi yang ada di Mesir. Selain itu juga dianggap sebagai revolusi pembebasan dari pemerintah otoriter, yang berfokus hanya pada kekuasaannya saja, tanpa mementingkan rakyat Mesir.

Dengan munculnya revolusi Arab Spring di Mesir ini, menandai awal bagi transisi negara, menuju pemerintahan yang demokratis. Untuk membuat demokrasi berfungsi baik dalam kehidupan di Mesir, tentunya bukanlah perkara yang mudah. Hal itu juga kemudian dipaparkan oleh Kuncahyono bahwa, "Demokrasi bisa bertahan bila ada pelembagaan dari cara-cara mencapai tujuan bersama serta kesepakatan untuk tetap saling percaya sebagai suatu bangsa meskipun berbeda pendapat. Hal inilah yang belum dimiliki Mesir, kuantitas kenegaraan dalam wadah model pemerintahan demokrasi masih sedikit di Mesir" (Kuncahyono, 2013: 21).

Situasi menjelang referendum menunjukkan ruang lingkup perdebatan negara dalam model pemerintahan demokratis di Mesir masih kecil. Mereka menuntut hak mereka kepada pemerintah, tetapi cara mereka menuntut dan lembaga yang menjadi saluran mereka agar ketentuan tersebut efektif ditindaklanjuti justru belum ada. Ada banyak komentator tetapi karena saluran demokratisnya belum lagi terbangun, maka kritik dari masyarakat cenderung terdengar lebih pedas daripada yang dimaksud (Kuncahyono, 2013: 334). Huntington menegaskan bahwa gelombang demokratisasi dalam sejarahnya tidak pernah bersifat unidirectional, alias mengerucut pada satu arah, pada bola tunggal di tingkat global tentang jalur transisi menuju demokrasi (Huntington, 2005: 96).

Pasca Mubarak, muncul satu keinginan di tengah rakyat untuk masuk dalam bentuk pemerintahan yang "pokoknya tidak sama dengan model Mubarak", artinya modal rezim otoriter yang serba tertutup dari segi informasi dan banyak konsentrasi kekuasaan di segelintir orang saja sementara yang lain harus ketakutan sehingga menjadi tantangan dalam Mesir yang baru. Masalahnya apa makna demokrasi bagi masyarakat Mesir? Justru belum ada makna yang terdefiniskan jelas, dan belum ada kesepakatan antara mereka saat ini.

Selama berpuluh-puluh tahun, pihak militer di Mesir punya dwifungsi untuk menjaga kestabilan politik. Beberapa artikel menunjukkan bahwa kelompok militer Mesir memiliki kepentingan besar setiap kali pemimpin baru datang ke negara tersebut, yaitu 5 sampai 40% perekonomian Mesir dikelola dan dimiliki oleh militer. Impor bahan mentah untuk industri, konstruksi, produksi, bahkan real estate ditangani tentara. Politisi sipil juga sering menggunakan militer untuk tetap berkuasa. Mubarak juga membangun model semacam itu.

Mursi belum berhasil keluar dari pola tadi dan bahkan mencontoh pola tersebut. Segera setelah berkuasa, Mursi sengaja menyingkirkan kepala angkatan bersenjata Muhammad Husein Tantawi dan mengangkat Abdul Fattah Al Sisi sebagai penggantinya, agar para perwira tua yang dianggap mengancam posisi Mursi tersingkirkan. Jenderal Al Sisi diangkat pada bulan Agustus 2012. Sisi yang baru berusia 57 tahun tersebut otomatis menjadi perwira militer paling senior di Mesir. Ironisnya, akhirnya Sisi pula yang mengumumkan ultimatum 48 jam bagi Mursi untuk mundur, menahan Mursi pasca kudeta dan menangkap bahkan menembaki para anggota Ikhwanul Muslimin yang dianggap sebagai pendukung berat Mursi (Kuncahyono, 2013: 356).

Setelah 11 tahun berlalu pasca Arab Spring, kondisi demokrasi di Mesir masih belum mengalami kemajuan signifikan. Jenderal Al Sisi telah menjalankan pemerintahan yang militeristik. Ia mempertahankan hubungan bilateral dengan kekuatan militer brutal yang disebut Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata (Supreme Council of Armed Forces - SCAF) dengan memberikan insentif keuangan dan loyalitas. Selain itu, pemerintahan Al Sisi mengontrol media dan menghalangi kebebasan jurnalistik, antara lain dengan mengesahkan undang-undang pers dimana kritik terhadap presiden dapat dihukum dengan denda atau penjara. Akibatnya, kini Mesir dikategorikan sebagai 'negara yang tidak bebas' dalam survey Freedom in the World 2021 (Agrawal, 2022).

Proses Panjang Demokratisasi di Mesir

Pengalaman demokrasi di Mesir bukanlah proses yang tiba-tiba. Muhammad Ali, yang memerintah Mesir dari tahun 1805 hingga 1923, memainkan peran kunci dalam kelahiran demokrasi. Selain memodernisasi bidang ekonomi dan sosial, Muhammad Ali memprakarsai musyawarah untuk memberi ruang bagi mufakat. Kementerian yang mewakili cabang eksekutif juga dibentuk agar kekuasaan tidak dimonopoli seperti raja. Selain itu, dukungan publik yang luas untuk Muhammad Ali memungkinkan pemerintah berfungsi. Periode ini ditandai dengan munculnya partai politik. Salah satu partai politik paling menonjol saat itu adalah Partai Wafd. Kekuasaan eksekutif raja tidak mutlak, karena partai ini memainkan peran kunci dalam memerintah raja. Pada periode

berikutnya, pengalaman berdemokrasi ditandai dengan tumbuhnya nasionalisme yang dipimpin oleh Gamal Abdul Nasser. Nasionalisme ini tumbuh pada masa revolusi yang dipimpin oleh Nasser sebagai prajurit bebas. Sejak saat itu, militer diakui sebagai faktor penting dalam jatuh banggunya demokrasi di negara piramida ini (Sihbudi, 2007: 37).

Nasser merupakan harapan sekaligus tantangan bagi demokrasi. Di satu sisi, dia telah berhasil membangkitkan nasionalisme Arab yang dapat dijadikan sebagai modal bagi demokrasi. Tetapi, di sisi lain dengan kekuasaannya yang bersifat absolut, dia telah memberangus kebebasan berpendapat dan berserikat, yang ditandai dengan pembubaran partai politik dan interdependensi lembaga indikatif. Posisi Nasser semakin terjepit, saat kalah dalam perang melawan Israel pada tahun 1967. Anwar Sadat adalah tokoh kunci dalam membuka kembali ruang demokrasi Mesir. Dia terus memimpin pemerintahan Nasser dari tahun 1971 hingga 1981. Selama masa pemerintahannya, Sadat memulihkan konstitusi dan membebaskan tahanan politik dari Ikhwanul Muslimin Nasser.

Banyak literatur menyinggung bahwa Sadat berkoalisi dengan Ikhwanul Muslimin dan kelompok Islam lainnya serta menggunakan idiom “jihad” dalam perangnya melawan Israel. Sadat tewas dalam sebuah insiden pada upacara kenegaraan di kalangan Islamis. Husni Mubarak menggantikan Sadat pada tahun 1981. Pada pemilu (1984), Mubarak menggelar pemilu untuk pertama kalinya. Ikhwanul Muslimin membentuk koalisi dengan Partai Wafd dan memenangkan 65 persen kursi di parlemen, memenangkan oposisi yang sangat kuat terhadap pemerintahan Mubarak. Pada tahun 1987, Ikhwanul Muslimin membentuk aliansi Islam dengan partai Buruh dan Liberal. Mereka memenangkan 17% suara. Mubarak mengubah Partai Nasional Demokrat (NDP) menjadi alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Saat ini, demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik untuk mendirikan pemerintahan berdasarkan hak pilih universal. Kedaulatan rakyat harus diwakili dalam parlemen dan dalam perimbangan antara badan-badan politik seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun, dalam perjalanannya, badan eksekutif atau presiden memiliki kekuasaan mutlak dan dengan demikian mengelola dan mengendalikan seluruh pemerintahan; hukum ada di tangan penguasa. Oposisi dibungkam dan bahkan dipenjara (Jatmika, 2014: 2).

Masalah demokrasi muncul karena Mubarak terus bersikeras mempertahankan kekuasaan dengan mengorbankan demokrasi. Pemilu diadakan secara rutin tetapi kualitasnya sangat rendah karena NDP menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk memenangkan pemilu. Pada saat yang sama, kebebasan bergerak partai oposisi dibatasi dan bahkan Ikhwanul Muslimin didiskriminasi karena dianggap sebagai kelompok ekstremis yang merusak stabilitas politik. Penindasan ini meninggalkan kesan buruk bagi demokrasi, khususnya di kalangan kelompok Islamis. Mereka sering menggabungkan

demokrasi dengan kepentingan politik Barat. Apalagi, demokrasi merupakan salah satu proyek kebijakan luar negeri AS di negara-negara Timur Tengah, termasuk Mesir. Apalagi, demokrasi identik dengan kebijakan otoriter Mubarak yang tidak memberikan ruang yang sama kepada partai-partai oposisi, khususnya kelompok Islamis. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Mubarak dan Islamis saling mempengaruhi karena kesinambungan pandangan politik mereka yang otoriter dan ekstrem (Alasdair, 1985: 112).

Determinasi Militer

Militer merupakan salah satu elemen penting dalam suatu bangun demokrasi di Mesir. Kegagalan demokrasi harus diakui tidak bisa dilepaskan dari intervensi militer dalam ranah politik praktis. Setelah jatuh dari anasir Dinasti Ottoman, pada tahun 1952 Nasser mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer. Sejak berkuasa, Nasser membubarkan parlemen, memecat seluruh elemen sipil dalam politik, dan membubarkan lembaga peradilan. Dia berhasil membuat rezim militer yang otoriter, yang didukung sepenuhnya oleh konstitusi pada masa itu. Nasser berhasil memaparkan kekuasaannya dan menerapkan politik represif terhadap kekuatan oposisi dan masyarakat sipil, khususnya Ikhwanul Muslimin. Mereka ditangkap, termasuk pimpinan mereka, Hasan Al Banna yang berakhir pada kematiannya, sedangkan organisasinya dilarang.

Petaka politik sentralistik yang diterapkan Nasser pada akhirnya ibarat senjata makan tuan. Kekalahan perang melawan Israel 1967, telah melumpuhkan cengkramannya dalam politik. Bersamaan dengan itu, Mesir menghadapi krisis ekonomi yang cukup serius, karena besarnya belanja di bidang militer. Sepanjang tahun 1975 dan 1977 meluas revolusi yang menuntut mundurnya Nasser. Maka, saat Nasser kalah melawan Israel dijadikan momentum untuk menggulingkan kekuasaan. Anwar Sadat melanjutkan kekuasaan Nasser. Anwar Sadat tidak berhasil mempertahankan kekuasaannya, karena tewas di tangan kalangan Islamis, yang kecewa dengan kebijakannya berdamai dengan Israel pada tahun 1979. Determinasi militer semakin kokoh saat Mubarak menggantikan Anwar Sadat (Jatmika, S, 2014: 4).

Husni Mubarak melanjutkan kebijakan pendahulunya, Nasser dan Sadat. Di satu sisi, dia memperkuat barisan militer di dalam ranah politik, tetapi juga melanjutkan perdamaian dengan Israel. Kebijakan yang dilanjutkan oleh Mubarak dari pendahulunya, yaitu "darurat militer", sehingga ia mempunyai kekuasaan absolut untuk membungkam oposisi baik dari gugus sosialis maupun islamis. Kekuasaan militer Mubarak semakin kokoh, saat ia menggunakan partai politik NDP sebagai basis dukungan massa. Di

samping itu, ia memperkuat kelas menengah, khususnya di kalangan pebisnis. Di sinilah determinasi militer yang dilakukan Mubarak mempunyai wajah lain demokrasi dan tumbuhnya kelas menengah.

Meskipun demikian, satu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa demokrasi akhirnya mati di tengah kuatnya ambisi kekuasaan kalangan militer dan keluarga Mubarak. Kebebasan politik dibungkam dan korupsi merajalela, yang menyebabkan besarnya angka buta huruf dan pengangguran, yang menyebabkan lahirnya revolusi. Ironisnya, saat revolusi bergelayut, justru Mubarak ditinggalkan oleh kalangan militer, yang selama ini menjadi penyokong dan kekuatan utamanya dalam politik. Dalam hiruk pikuk revolusi, kalangan militer justru berpihak kepada rakyat daripada Mubarak (Sihbudi, 2007: 40).

Kini rakyat Mesir sedang dihadapkan pada kekhawatiran serupa, perihal naiknya militer kekuasaan. Militer yang sejatinya mengakhiri kekuasaannya pada akhir Juni 2012, tapi justru memperpanjang dominasi politiknya dengan cara membubarkan parlemen melalui keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan, bahwa pemilu parlemen inkonstitusional karena calon independen juga diisi oleh kandidat dari partai politik.

Muncul kekhawatiran, bahwa militer akan melakukan kudeta, sebagaimana dilakukan Nasser. Jika itu terjadi maka militer merupakan tantangan serius dalam membangun demokrasi di Mesir pasca revolusi. (Kuncahyono, 2013: 345).

Frozen Democracy di Mesir

Fenomena yang terjadi di Mesir antara tahun 2011 dan 2013 menunjukkan bahwa di Mesir tengah terjadi fenomena demokrasi beku atau *frozen democracy*. Indikasi dari demokrasi beku adalah stagnasi ekonomi, terhentinya proses pembentukan masyarakat sipil, tidak adanya stabilitas sosial-politik, dan adanya masalah sosial politik dan hukum warisan pemerintahan sebelumnya yang belum terselesaikan, sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

Pertama, tren perekonomian Mesir sebelum pecahnya revolusi sudah dirundung beberapa masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata. Tingkat pengangguran Hingga jatuhnya Mubarak, 700.000 anak muda bergabung dalam antrean panjang pencari kerja setiap tahun. Namun, yang masuk angkatan kerja hanya 30.000 orang (Kuncahyono, 2013: 57-58). Selain itu, Bank Dunia menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya terjadi pada masa pemerintahan Mubarak, dengan tingkat investasi langsung dan PDB meningkat. Namun

pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh semua orang, sehingga masih menunjukkan kesenjangan (World Bank, Egypt—Overview).

Kedua, sejak Husni Mubarak tumbang pada awal 2011, rakyat Mesir berharap perdamaian dan stabilitas bisa kembali normal. Namun, harapan itu pupus ketika muncul persoalan “mayoritas” dan “minoritas”. Titik tolak pemutusan hubungan rakyat Mesir adalah keputusan presiden pada 22 November 2012. Pada dasarnya, keputusan ini menjadi hantu yang menakutkan bagi mayoritas rakyat Mesir. Menimbang bahwa isi ketetapan tersebut bertujuan untuk memperhatikan kepentingan mayoritas dan melarang golongan minoritas, dan terutama untuk menegaskan supremasi presiden juga di depan hukum. Tiba-tiba, keputusan kontroversial membagi rakyat Mesir menjadi dua kubu, argumen pro dan kontra. Semangat solidaritas dan perjuangan tangan kosong untuk menggulingkan Mubarak langsung sirna. Kemarahan dan frustrasi berkecamuk di kalangan rakyat Mesir yang merasa pemerintahan hasil revolusi 25 Januari menyimpang dari amanat revolusi. Tak ayal, pecah konflik horizontal antara kedua kubu tersebut, sehingga tidak ada korban jiwa yang terselamatkan. Dalam konteks pembentukan masyarakat madani, dalam pembentukan masyarakat terdiri atas lembaga-lembaga otonom yang mampu menyeimbangkan kekuasaan negara.

Kelanjutan situasi ini merupakan hambatan serius bagi proses penguatan demokrasi. Tentara menunjukkan lagi sikap brutal dan menindas pendukung Mursi. Langkah itu bisa menandakan kemunduran dalam upaya membangun masyarakat sipil di Mesir. Oleh karena itu, ada juga perbedaan pendapat bahwa Mesir menjadi “Islamisasi” karena Ikhwanul Muslimin kini berkuasa. Yang sudah dikenal dalam sejarah politik Mesir sebagai salah satu organisasi Islam puritan, yang tidak hanya memiliki ideologi fundamental, tetapi juga menginginkan penerapan syariat Islam di Mesir secara kaffah (holistik). Kemunculan posisi ini tidak jauh, terlihat dari perubahan mendasar konstitusional hasil referendum Desember 2012. Di dalamnya, prinsip-prinsip hukum Islam pada hakekatnya muncul sebagai sumber utama peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi.

Ketiga, dinamika sosial-politik pascarevolusi 2011, kecenderungannya semu dan tidak mengerucut ke arah pengonsolidasian demokrasi. Pada awalnya revolusi Mesir lahir dan kemudian bergerak tanpa ideologi atau keberpihakan, tetapi sederhana dengan satu tujuan menggulingkan Presiden Husni Mubarak (Kuncahyono, 2013: 29). Setelah Mubarak jatuh, semuanya berubah, kelompok liberal-sekuler yang berperan dalam penumbangan Mubarak merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh Mursi setelah mengeluarkan Dekrit Presiden 22 November. Pada Desember 2012, Mursi mendorong konstitusi yang pro Islam melalui jalan referendum. Ironisnya walaupun partisipasi kurang dari 30 persen dari suara mayoritas, namun tetap diloloskan. Eskalasi politik tidak

pelak memanas hingga mendorong kembali aksi demonstrasi menuntut Presiden Mursi untuk mundur. Di bawah konstitusi yang baru, pemerintah menggelar pemilu parlemen (Majlis Al Sha'ab), lebih dari 60 persen anggota parlemen yang baru diisi oleh Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Sementara keterwakilan dari kelompok liberal dan sekuler tidak cukup diakomodir. Sehingga legitimasi yang hadir tidak turut melibatkan kelompok minoritas. Padahal dalam alam demokrasi bukan berarti suara mayoritas lantas mengabaikan suara minoritas. Di bawah roda pemerintahan Mursi, sebagian besar jabatan publik diisi oleh kader Ikhwanul Muslimin.

Dinamika sosial politik pasca revolusi 2011, kecenderungannya terlihat jelas dan tidak mengerucut pada konsolidasi demokrasi. Pada awalnya, revolusi Mesir lahir dan bergerak tanpa ideologi dan partai, namun hanya dengan satu tujuan - penggulingan presiden Husni Mubarak (Kuncahyono, 2013: 29). Pasca jatuhnya Mubarak, semuanya berubah, kelompok liberal-sekuler yang ikut menggulingkan Mubarak merasa ditinggalkan dan dikhianati oleh Mursi setelah dekrit presiden dikeluarkan pada 22 November. Pada Desember 2012, Mursi menyerukan konstitusi Islam dalam sebuah referendum. Ironisnya, meski jumlah pemilih kurang dari 30 persen mayoritas, mereka tetap lolos. Eskalasi politik tak terhindarkan memanas hingga demonstrasi yang menyerukan Presiden Mursi dihentikan. Dengan latar belakang ketegangan politik dan polarisasi sosial yang semakin dalam sejak November 2012, serangkaian konfrontasi antara Ikhwanul Muslimin melawan oposisi, public umum, komunitas Syiah, Koptik, dan lain-lain terjadi sehingga merusak stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan (El-Sherif, 2014: 16).

Keempat, berakhirnya rezim otoritarian Husni Mubarak menyisakan begitu banyak warisan permasalahan baik itu sosial, politik, hukum. Masalah ini tidak berhasil diselesaikan oleh presiden penerusnya, baik Mursi maupun Al Sisi.

Faktor-faktor Penghalang Demokratisasi Mesir Pasca-Arab Spring

Kegagalan dalam upaya mewujudkan proses demokratisasi di Mesir pasca-Arab Spring tidak hanya sebatas dilihat dari peran militer yang sangat kuat dan dominan dalam perpolitikan dalam negeri Mesir, namun terdapat beberapa faktor lain yang mendorong kegagalan Mesir dalam mewujudkan demokrasi pasca-Arab Spring, yaitu sebagai berikut.

1. Fragmentasi Kelompok Elite Politik

Kegagalan demokrasi yang terjadi di Mesir dilatarbelakangi oleh perpecahan elite politik di masa transisi Presiden Mursi. Hal ini terlihat dari gagalnya kesepakatan antar-

elite politik terkait pembagian kekuasaan di Mesir, serta drama perpolitikan yang terus berlanjut. Perpecahan yang dimaksud adalah tidak ada kesepakatan dan kesepakatan yang sah antara kelompok Islam dengan kelompok liberal-sekuler untuk mempertahankan pemerintahan Presiden Mursi dari kalangan warga sipil yang terpilih secara demokratis. Keduanya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam dinamika perpolitikan Mesir. Hal ini kemudian mengakibatkan terjadinya perpecahan di Mesir yang membuat kondisi negara menjadi tidak stabil. Hal ini mencerminkan perilaku elite politik yang tidak tunduk pada demokrasi. Dengan demikian, maka terjadi sebuah kemunduran demokrasi yang sedang berlangsung di Mesir.

2. Krisis Ekonomi

Keadaan ekonomi yang stabil dan sejahtera merupakan kriteria pencapaian yang sangat utama dalam suatu pemerintahan. Pemerintah dianggap sebagai aktor yang paling bertanggung jawab atas kemajuan dan berkembangnya ekonomi secara pesat. Di masa pemerintahan Mursi, Mesir mengalami kesenjangan sosial yang cukup tajam. Kesenjangan ini terjadi akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat. Kondisi ekonomi Mesir telah memburuk sejak di bawah kepemimpinan Husni Mubarak. Setelah lengsernya Husni Mubarak yang kemudian digantikan dengan Mursi, harus berhadapan dengan krisis keuangan negara. Krisis keuangan tersebut merupakan dampak dari penyusutan sektor wisata akibat ketidakstabilan politik. Kondisi ekonomi diperburuk dengan kurangnya minat investor terhadap Mesir dan harga pangan yang melambung tinggi. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut sangat berdampak pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Mesir.

Stabilitas politik negara akan bergantung pada stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan faktor penentu dalam keberlangsungan demokrasi di Mesir. Tuntutan rakyat terhadap kesejahteraan kepada Presiden Mursi memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat. Mursi dianggap gagal dalam membangun stabilitas perekonomian dan kesejahteraan rakyat Mesir. Mursi mencoba menyelamatkan ekonomi dengan menegosiasikan, antara lain, pinjaman IMF dan pinjaman dari negara-negara sahabat seperti Qatar, Arab Saudi, dan Turki. Gagasan Mursi tentang perbaikan ekonomi fundamental tertuang dalam Proyek Renaisans (Al Nahda). Namun hingga detik-detik terakhir sebelum terguling, program tersebut masih belum jelas. Kegagalan tersebut dijadikan senjata oleh kalangan oposisi Mursi untuk menentang pemerintahannya, bahkan melengserkan kekuasaannya melalui kudeta militer. Harapan terpenting dari revolusi yang melengserkan Husni Mubarak ialah pemulihan ekonomi dan peningkatan proses demokrasi di Mesir. Namun, pada realitanya karakter pemerintahan Mursi tidak jauh berbeda dengan pendahulunya, rezim Mubarak.

3. Kudeta Militer

Dalam negara demokratis, militer tidak terlibat langsung dalam politik praktis. Kualitas demokrasi menjadi turun, bila peran aktif militer semakin menguat dalam peran sipil (Nordlinger, 1990). Potret perpolitikan Mesir di bawah pemerintahan Mursi mengalami kekacauan dengan merambahnya protes-protes rakyat terhadap Dekrit Presiden 22 November 2012 di beberapa daerah. Kondisi itu membuat pemerintahan semakin buruk dan memicu militer untuk mengambil langkah dalam mengamankan negara. Ini merupakan titik awal yang dimanfaatkan militer untuk melakukan intervensi politik di tengah kekisruhan. Dari segala tuntutan kegagalan pemerintahan Mursi untuk mengatasi kekisruhan, nampaknya kalangan militer menganggap Mursi tidak mampu membendung dan mengatasi kekacauan tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 1 Juli 2013, militer memberi ultimatum pada Presiden Mursi untuk menuntaskan masalah politik Mesir dalam waktu 48 jam. Mursi menolak tuntutan militer, sebab ia merasa memiliki legitimasi kekuasaan yang dipilih oleh rakyat secara sah dan demokratis.

Akibat penolakan tuntutan militer oleh Mursi, maka militer melancarkan intervensinya untuk menggulingkan kekuasaan Mursi. Kudeta tersebut dilandasi dengan roadmap masa depan Mesir yang dibahas pada pertemuan antara Al Sisi dengan tokoh-tokoh politik oposisi Mursi. Kudeta yang mengakhiri kekuasaan Mursi menandai gagalnya demokrasi Mesir. Pasalnya, Mursi merupakan presiden terpilih pertama pada masa transisi, dan pemerintahan Mursi pada awalnya muncul sebagai harapan baru demokrasi bagi Mesir. Akan tetapi, situasi politik Mesir di bawah pemerintahan Mursi ternyata tidak kunjung membaik.

Dalam bentuk apapun, kudeta dinisbatkan sebagai bentuk pengingkaran dari proses demokratisasi yang sedang tumbuh di kedaulatan Mesir setelah Revolusi 11 Februari 2011. Militer telah merenggut seluruh nilai-nilai dan proses demokrasi di Mesir. Rakyat Mesir harus menelan pahitnya kehilangan kesempatan untuk mengekspresikan kebebasan melalui demokrasi yang sehat. Masyarakat Mesir harus kembali membangun proses-proses demokrasi dari dasar. Seharusnya di setiap negara yang menganut sistem demokrasi, semua kalangan harus menjadi jagapati atas terselenggaranya demokratisasi. Lemahnya kekuasaan eksekutif serta keselarasan kepentingan militer untuk kepentingan pribadinya, pemerintahan akan berubah menjadi rezim militer karena perwira militer sendiri yang merampas kekuasaan dari rezim sebelumnya. Kudeta ini menyebabkan Mesir masuk dalam pusaran konflik perang saudara, dan meningkatkan aksi terorisme secara massif.

Hal ini menunjukkan lunturnya demokrasi di Mesir dengan nuansa parlemen yang tidak demokratis, pemerintah dan presiden hanya sebatas representasi badan eksekutif semata, bukan lagi sebagai pilar utama dalam sistem politik yang fungsional.

4. Dominasi Militer dalam Politik Mesir

Perkembangan demokratisasi Mesir tidak terlepas dari pengaruh besar militer sejak runtuhnya sistem monarki pada tahun 1952. Keterlibatan militer di Mesir diawali dengan tergabungnya para petinggi militer dalam sebuah organisasi penggulingan rezim Raja Farouk tahun 1952, yang dikenal dengan Organisasi Perwira Bebas (Free Officer). Peristiwa tersebut merupakan titik krusial Mesir didominasi oleh kekuatan militer dan presiden yang memiliki latar belakang militer yang melekat hingga jatuhnya rezim Mubarak pada tahun 2011 (Dam, 2001: 12).

Di masa rezim Mubarak, kedudukan militer semakin kuat di Mesir. Militer diberikan banyak hak istimewa, tidak hanya sebatas dalam bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Sejak saat itulah militer secara terbuka membangun kekuasaannya yang dikenal dengan perumpamaan “negara di atas negara”, yang berdampak signifikan pada struktur ekonomi dan sosial di Mesir.

Di tengah polarisasi serta perpecahan yang mendalam di masa pemerintahan Mursi, militer memanfaatkan momentum untuk kembali bermain dalam perpolitikan Mesir. Di tengah protes massa yang menuntut pengunduran Mursi dari kursi pemerintahannya, di langit kota Mesir nampaknya terlihat sebuah pesawat militer terbang di atas kerumunan massa dan menjatuhkan bendera Mesir sebagai tanda bahwa militer memihak rakyat Mesir. Hingga pada akhirnya Mursi berhasil digulingkan dari kursi kekuasaannya setelah rangkaian skenario yang dibangun oleh militer.

Dengan demikian, hingga hari ini Mesir masih berada di bawah bayang-bayang elit penguasa lama yang didominasi oleh militer. Bayangan rezim lama inilah yang menyebabkan cacatnya proses demokratisasi di Mesir pasca-Arab Spring. Dalam hal ini, militer dan elite penguasa lama masih mempertahankan posisinya di hati rakyat Mesir. Ini bukan hanya karena militer memiliki sejarah panjang dalam melindungi negara, tetapi demonstran anti Mursi berupaya untuk tidak menjadikan seorang pemimpin Mesir yang Islamis. Mereka juga khawatir dengan gerakan MB yang dianggap akan mengubah sistem negara menjadi Islamis seperti halnya revolusi Iran tahun 1979 (Al-Amin, 2013; Yumitro & Estriani, 2017: 23).

Dari seluruh pemaparan di atas, terlihat jelas bahwa militer Mesir memiliki ikatan politik dan ekonomi yang kuat dan mendalam, selain juga memiliki hubungan yang erat dengan aktor-aktor eksternal serta elite penguasa Mesir. Oleh karena itu, terjadi

kegagalan demokrasi di Mesir karena peran militer yang sangat dalam dalam politik praktis Mesir. Demokrasi hanya sebatas tameng dalam praktiknya. Al-Sisi mengklaim bahwa Mesir merupakan negara demokrasi, tetapi dalam praktiknya, untuk mempertahankan kekuasaannya, Al-Sisi tidak pernah menunjuk warga sipil tanpa latar belakang militer sebagai pemegang kekuasaan utama Mesir. Al-Sisi banyak membuat skenario dengan karakteristik sistem demokrasi agar terlihat demokratis. Setelah Al Sisi menjadi presiden tahun 2013, pemilihan presiden diadakan tahun 2018, dimana terjadi tindakan-tindakan tidak demokratis, antara lain, otoritas Mesir melakukan represi yang menyebabkan beberapa kandidat lain membatalkan pencalonan atau menghentikan kampanye, Al Sisi akhirnya menang dengan 97% suara untuk masa jabatan empat tahun berikutnya yang seharusnya berakhir pada tahun 2022. Namun pada tahun 2019, pemerintah melakukan amandemen konstitusi dimana salah satu pasalnya menambah masa jabatan presiden, sehingga pemilu yang seharusnya dilangsungkan tahun 2022, bergeser menjadi 2024 (cihrs.org, 2023).

Simpulan

Arab Spring yang berkejolak sejak awal 2011 lalu menjadi awal kebangkitan gerakan massa untuk menuntut adanya perubahan tatanan sosial politik, yaitu harapan untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih ideal. Masyarakat Dunia Arab meyakini bahwa kehidupan yang ideal itu adalah dengan terbangunnya sistem politik yang demokratis. Maka dari itu, demokratisasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Arab Spring. Meskipun demikian, tidaklah mudah untuk membangun pranata politik yang demokratis karena setiap negara menghadapi tantangan-tantangan tersendiri.

Mesir merupakan salah satu negara yang semula terlihat berhasil dalam melangkah menuju kehidupan yang demokratis, dengan ditumbangannya rezim Husni Mubarak yang telah berkuasa secara militeristik selama 30 tahun. Penggulingan Mubarak dilakukan melalui aksi protes yang dilakukan oleh warga Mesir yang dikonsolidasi melalui media sosial. Demonstrasi besar anti-rezim terjadi karena masyarakat telah mengalami ketidakadilan, kurangnya penegakan hukum, korupsi, dan pengekangan terhadap kebebasan warga. Namun setelah Mubarak terguling dan terpilih pemerintahan baru melalui proses demokratis pada tahun 2012, gejolak politik kembali terjadi. Massa kembali berdemonstrasi menentang pemerintahan Mursi dari Ikhwanul Muslimin yang cenderung bercorak Islamis dan antidemokrasi. Sebagai akibatnya, militer kembali mengambil alih kekuasaan dan hingga saat ini kekuasaan berada di tangan Jenderal Al Sisi. Meskipun ia menang dalam pemilu 2018, namun banyak indikator demokrasi yang dilanggarnya, antara lain pembungkaman oposisi dan

media massa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang terjadi di Mesir adalah praetorianisme (peran militer mendominasi pengambilan keputusan) dan frozen democracy (bekunya sistem politik demokrasi yang berkembang akibat berbagai batasan yang ada).

Daftar Pustaka

- Agastya, M. (2013). *Badai Revolusi Timur Tengah yang Penuh Darah*. Yogyakarta: IRSiSoD.
- Agrawal, R. (2022). *Al-Sisi's Egypt: A Mirage of Democracy*. [online] Chicago Policy Review. Dalam: <https://chicagopolicyreview.org/2022/12/19/al-sisis-egypt-a-mirage-of-democracy/> [Diakses 5 Januari 2023].
- Alasdair, D. (1985). *Political Geogrhaply in North Africa and Middle East*. Oxford: Oxford University Press.
- Al-Amin, E. (19 Juli 2013). *The Grand Scam: Spinning Egypt's Military Coup Counter*. [online] Global Research. Dalam: <https://globalresearch.ca/the-grand-scam-spinning-egypts-military-coup/5343280?pdf=5343280> [Diakses 10 Februari 2023].
- CIHRS.org (Cairo Institute for Human Rights Studies). (2023). *Egypt's 2024 Presidential Elections: A Dead End*. [online] Dalam: <https://cihrs.org/egypts-2024-presidential-elections-a-dead-end/?lang=en> [Diakses 10 Februari 2023].
- Dahl, Robert A. (1971). *Polyarchy: Participation and opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Dam, S. (2001). *Militer dan Demokratisasi di Nigeria, Mesir dan Afrika Selatan*. Jakarta: P2PLIPI
- El-Sherif, Ashraf. (2014). *Egypt's Post-Mubarak Predicament*. [online] Carnegie Endowment for International Peace. Dalam: <https://carnegieendowment.org/2014/01/29/egypt-s-post-mubarak-predicament-pub-54328> [Diakses 8 Februari 2023].
- Hitti, PK. (2001). *Sejarah Ringkas Dunia Arab*. Yogyakarta: Iqra' Pustaka.
- Huntington, S. (2005). *The Third Wave*. London: Lynne Rienner Publisher.
- Iqbal, Muhammad., dan Sayomukti, Nurani. (2011). *Ben Ali, Mubarak, Khadafy: Pergolakan Politik Jazirah Arab Abad 21*. Bandung: Medium.
- Jatmika, S. (2014). *Pengantar Studi Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Maharsa.

- Kamrava, Mehran. (2014). *Beyond The Arab Spring: The Evolving Ruling Bargain In The Middle East*. Oxford: Oxford University Press.
- Kuncahyono, T. (2013), *Musim Semi di Suriah*. Jakarta: Kompas.
- Kuncahyono, T (2013). *Tahrir Square: Jantung Revolusi Mesir*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Lubis, A. (2011). *Perubahan Sosial-Politik di Timur Tengah*. *Jurnal Luar Negeri Perubahan di Timur Tengah dan Afrika*.
- Mahmuzar. (2013). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Nusa Media.
- Markoff, John. (2002). *Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial Dan Perubahan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nordlinger, Eric A. (1990). *Militer Dalam Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rustow, Dankwart A. (1970). *Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model*. *Jurnal Comparative Politics*, [online] 2(3), 337-363. Dalam: <https://www.jstor.org/stable/421307> [Diakses 4 Januari 2023]
- Sahdan, G. (2004). *Jalan Transisi Demokrasi Pasca Soeharto*. Jogjakarta: Podok Edukasi.
- Sahide, A. (2015). *The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya*. *Jurnal Hubungan Internasional*, [online] 4(2), 118-129. Dalam: <https://doi.org/10.18196/hi.2015.0072.118-129> [Diakses 15 Maret 2023].
- Said Ali, Asad. (2012). *Ideologi Gerakan Masa Reformasi Gerakan-Gerakan Sosial Politik Dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: renada Media Grup.
- Sau, Ranjit. (2004). *Democracy and Reform: Voices in West Asia*. *Economic and Political Weekly*, [online] 39(38), 18-24. Dalam: <http://dx.doi.org/10.2307/4415556> [Diakses 13 April 2023].
- Sihbudi, R. (2007). *Menyandera Timur Tengah*. Bandung: Mizan.
- Tamburaka, Apriadi. (2011). *Revolusi Timur Tengah, Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-Negara Timur Tengah*. Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Ubaedillah, A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, demokrasi Dan Pencegahan Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ubaedillah, A & Rozak, A. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.

- Utami, Afini Nurdina., dan Anam, S. (2022). Dominasi Militer Dalam Politik Dan Pemerintahan di Mesir: Kegagalan Demokratisasi di Mesir Pada Kudeta 2013. *Jurnal Review of International Relations (RIR)*, [online] 4(2), 132-142. Dalam: <https://doi.org/10.24252/rir.v4i2.29249> [Diakses 10 Maret 2023]
- Yumitro, G., dan Estriani, H. N. (2017). The Quo Vadis of Democratization in Post-Egypt Arab Spring. *CIRR*, [online] 23(79), 157-188. Dalam: <https://cirrj.org/index.php/cirrj/article/view/203/202> [Diakses 10 Maret 2023]